



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH (LPPD)
KECAMATAN TAMBANG ULANG
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG**
Alamat : Jalan A. Yani Km. Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ-LPPD) dari SKPD Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dapat terselesaikan. Proses penyusunan LKPJ-LPPD SKPD ini didasari dari data-data kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 sehingga dapat menghasilkan laporan sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan dari Kecamatan Tambang Ulang Tahun Anggaran 2023 serta sebagai informasi kepada masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dari SKPD Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ini memuat Program Kegiatan dan sasaran pelaksanaan Sub Kegiatan Program pada satuan Satuan Perangkat Kerja Daerah dan Realisasi Anggaran dari masing-masing pelaksanaan kegiatan.

Semoga Laporan LKPJ-LPPD tahun 2023 SKPD Kecamatan Tambang Ulang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai bahan selanjutnya.

Tambang Ulang, 08 Januari 2024
CAMAT TAMBANG ULANG



Muhammad Aminullah, S.STP,M.AP
NIP. 19870308 200602 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ-LPPD) dari SKPD Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dapat terselesaikan. Proses penyusunan LKPJ-LPPD SKPD ini didasari dari data-data kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 sehingga dapat menghasilkan laporan sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan dari Kecamatan Tambang Ulang Tahun Anggaran 2023 serta sebagai informasi kepada masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dari SKPD Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ini memuat Program Kegiatan dan sasaran pelaksanaan Sub Kegiatan Program pada satuan Satuan Perangkat Kerja Daerah dan Realisasi Anggaran dari masing-masing pelaksanaan kegiatan.

Semoga Laporan LKPJ-LPPD tahun 2023 SKPD Kecamatan Tambang Ulang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai bahan selanjutnya.

Tambang Ulang, 08 Januari 2024
CAMAT TAMBANG ULANG


Muhammad Aminullah, S.STP,M.AP
NIP. 19870308 200602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
Bab I PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. GAMBARAN UMUM SKPD.....	4
A. Struktur Organisasi.....	4
B. Kepegawaian.....	6
C. Data Statistik.....	7
Bab II ARAH KEBIJAKAN UMUM SKPD	
1. VISI DAN MISI SKPD.....	9
2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD.....	10
Bab III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.....	12
2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.....	14
Bab IV PENUTUP.....	22

DAFTAR TABEL

1. PNS Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan	6
2. PNS Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2023 Berdasarkan Pangkat/Golongan	7
3. PNS Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2023 Berdasarkan Jabatan Struktural	7
4. Daftar PNS Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2023.....	8
5. Anggaran dan Realisasi BTL dan BL Tahun 2023 Kantor Kecamatan Tambang Ulang.....	17
6. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2023 Kantor Kecamatan Tambang Ulang	18
7. Realisasi Kinerjadan Program Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun Anggaran 2023.....	19
8. Daftar Sarana dan Prasarana pada Kantor Kecamatan Tambang Ulang....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

Kecamatan Tambang Ulang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut mencoba memperbaiki sistem sedikit demi sedikit, tahap demi tahap sehingga pada akhirnya kita dapat menciptakan sistem birokrasi yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance menuju suatu keadaan dimana terciptanya suatu masyarakat madani sesuai visi Kabupaten Tanah Laut berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2008 – 2013.
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009–2013 dan peraturan-peraturan lain yang terkait;
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 tahun 2010 tentang uraian tugas kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
19. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indoseia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomot 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

A. VISI

Sebagaimana Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Tambang Ulang tahun 2019-2023 yang telah disusun, dan tahun 2023 ini merupakan tahun kelima dalam melaksanakan Rencana Strategik (Renstra) tersebut yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program, maka sebagaimana Visi Kecamatan Tambang Ulang yaitu "Mewujudkan pelayanan yang optimal dengan Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius dan Aktual serta Sinergi - BERINTERAKSI"

B. MISI

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingindan menguarikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi. Meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan.

Sebagaimana Misi Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut, maka yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tambang Ulang adalah:

Misi 1: Berkarya Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Misi ini bertujuan Meningkatkan Kepuasan publik terhadap pelayanan di Kecamatan dengan maksud agar Meningkatnya Kepuasan publik terhadap pelayanan di kecamatan.

Misi 3: Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Misi ini bertujuan Meningkatkan nilai evaluasi sakip Kecamatan sehingga nilai sakip kecamatan menjadi sangat baik.

Misi 4: Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas.

Misi ini bertujuan meningkatkan kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat agar kuantitas dan kualitas kegiatan berbasis keagamaan, sosial dan budaya lebih meningkat.

1.3. DATA UMUM DAERAH

Kecamatan Tambang Ulang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 yang terdiri dari Sembilan Desa yaitu : Desa Gunung Raja, Desa Pulau Sari, Desa Kayu Abang, Desa Bingkulu, Desa Tambang Ulang, Desa Sungai Jelai, Desa Sungai Pinang, Desa Martadah, dan Desa Martadah Baru dengan Ibu kota Desa Tambang Ulang. Data Umum Daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi:

1. Data Geografis Wilayah

Kecamatan Tambang Ulang adalah bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut yang terletak pada : 114,669° - 114,881° Bujur Timur dan 3,59849° - 3,70628° Lintang Selatan.

Kecamatan Tambang Ulang Luas daerahnya ±160,75 Km² dengan dikelilingi oleh batas :

Sebelah Utara	: Kecamatan Bati-Bati
Sebelah Timur	: Kecamatan Pelaihari
Sebelah Barat	: Kecamatan Kurau

Sebelah Selatan	: Kecamatan Pelaihari
Tinggi dari permukaan laut	: 25 – 100 meter
Luas Wilayah	: 160,75 Km2
Jumlah Desa	: 9 Desa

2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 adalah sebanyak 18.756 orang jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.485 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 9.271 Jiwa dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) sebanyak 5.610 KK.

3. Pertumbuhan Penduduk

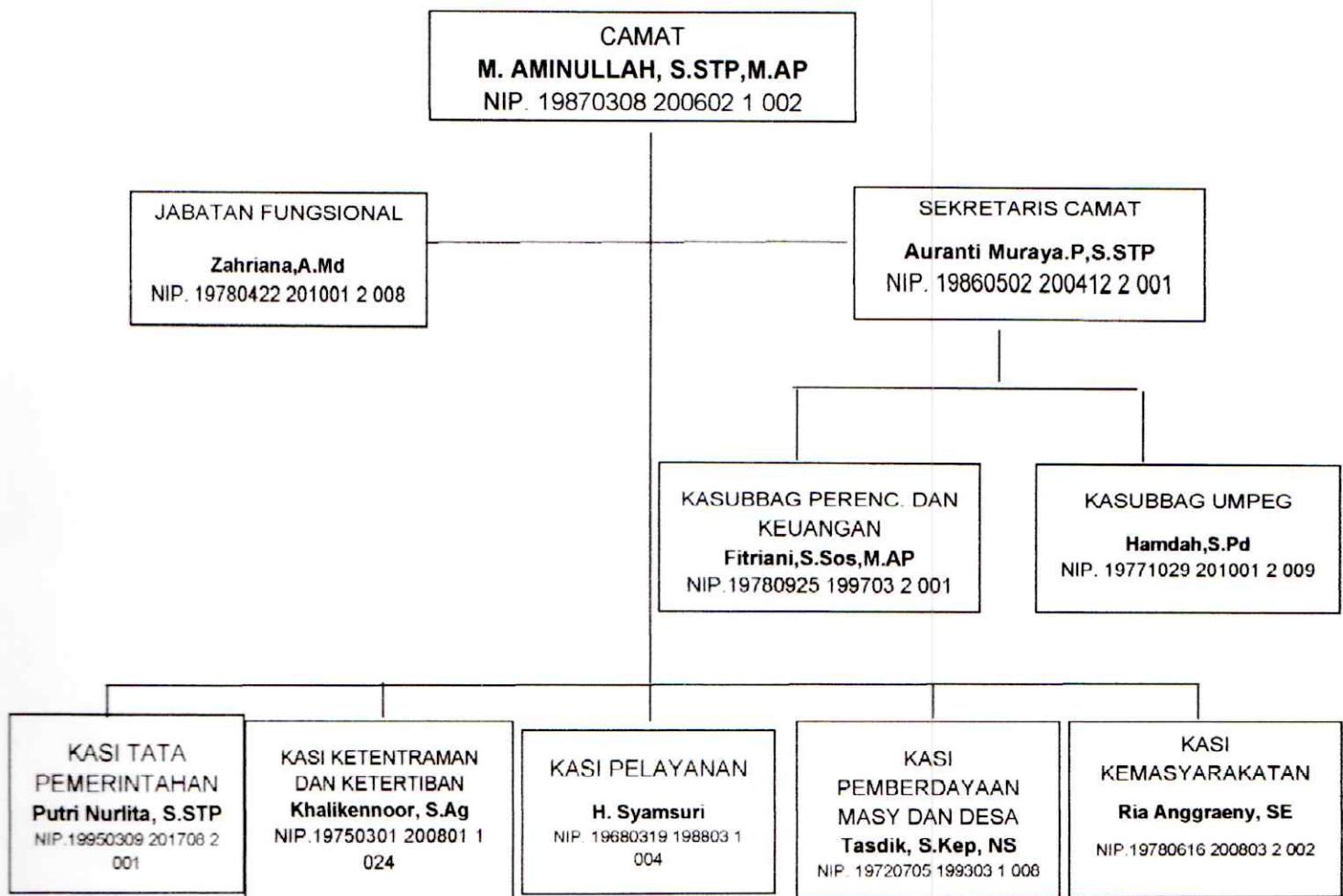
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan perwaktu unit untuk pengukuran. Demikian halnya dengan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang terus bertambah penduduknya karena adanya perkawinan, kelahiran, kematian, perpindahan penduduk dari daerah lain ke Wilayah Kecamatan Tambang Ulang.

4. Jumlah PNS

Jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Wilayah Kantor Kecamatan Tambang Ulang sebanyak 15 Orang yang terdiri dari 8 orang PNS berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang PNS berjenis kelamin perempuan. Jumlah Pejabat Struktural Di Kantor Kecamatan Tambang Ulang terdiri dari 2 orang pejabat Eselon III, 7 orang pejabat Eselon IV. Hal ini bisa dilihat pada struktur organisasi Kantor Kecamatan Tambang Ulang.

Dasar Hukum Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Struktur Organisasi Kecamatan Tambang Ulang



A. Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Kepala Seksi Kemasyarakatan
9. Kepala Seksi Pelayanan

Camat mempunyai tugas pokok ;

Camat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan dan kewenangan oleh Bupati, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundangan.

Sekretaris Camat (Sekcam) mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis melaksanakan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh organisasi dilingkup Kecamatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk menyelenggarakan kegiatan surat-menjurut dan kearsipan,mengelola administrasi kepegawaian,urusan rumah tangga dan perlengkapan,humas dan protokol.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan, melakukan penyusunan rencana anggaran,mengelola keuangan serta menyusun laporan keuangan lingkup Kecamatan.

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan perumusan Kebijakan pelaksanaan,evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Kecamatan, desa dan

Kelurahan,melaksanakan urusan Pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan serta keagrariaan lingkup Kecamatan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan .

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban lingkup Kecamatan.

Kepala Seksi Kemasyarakatan. Mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan,evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan, melaksanakan urusan kemasyarakatan, lingkup Kecamatan.

Kepala Seksi Pelayanan Mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan, melaksanakan urusan pelayanan, lingkup Kecamatan.

B. Kepegawaian

Pada tahun 2023 jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Tambang Ulang sebanyak 15 orang, sampai dengan bulan Desember 2023 berjumlah 15 orang PNS, PTT sebanyak 5 orang yang terdiri dari :

1. PNS Kantor Kecamatan Tambang Ulang : 15 orang
2. PTT : 5 orang

Jumlah PNS di Kantor Kecamataan Tambang Ulang dibedakan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah pejabat struktural dan fungsional yang ada di Kecamatan Tambang Ulang pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 1.1

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1	2	3	4	5
1.	Sarjana S2	1	1	2
2.	Sarjana S1	3	5	8
3.	Diploma III	0	0	0
4.	SMA/Sederajat	3	1	4
5.	SMP/Sederajat	1	0	1
6.	SD	0	0	0
	Jumlah	8	7	15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tambang Ulang dipimpin oleh seorang Camat dan dibantu oleh 5 orang Kepala Seksi dan Seorang Sekretaris dibantu oleh 2 orang Kepala Sub bagian, Skala jabatan Camat adalah Eselon IIIa, Sekretaris adalah Eselon IIIb, Kepala Seksi (Kasi) Eselon IVa dan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) adalah Eselon IVb. Masing-masing Kasi dan Kasubbag dibantu oleh tenaga pelaksana.

Tabel 1.2. PNS Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2023 Berdasarkan Pangkat / Golongan

NO.	PANGKAT	GOL. / RUANG	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1.	Pembina	IV/a	2	
2	Penata Tk I	III/d	6	
3.	Penata Muda Tk.I	III/b	2	
4.	Penata Muda	III/a	1	
5.	Pengatur Tk.I	II/d	3	
6.	Pengatur	II/c	0	
7.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1	
JUMLAH			15	

Tabel 1.3. PNS Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2023 Berdasarkan Jabatan Struktural :

NO.	JABATAN ESELON	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1.	Eselon III a	1	
2	Eselon III b	1	
3.	Eselon IV a	5	
4.	Eselon IV b	2	
5.	Staf Kecamatan	6	

5. Realisasi Pendapatan menurut jenis pendapatan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	PENDAPATAN TAHUN 2022	9.000.000	0	0
2	PENDAPATAN TAHUN 2023	0	0	0

Realisasi Pendapatan menurut jenis pendapatan dari Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2022 sebesar Rp. 0,- dari target anggaran Rp.9.000.000,- (0%), sedangkan pada tahun 2023 realisasi anggaran Rp. 0,- dari target anggaran Rp. 0,- (0%), hal ini dikarenakan adanya larangan untuk melakukan pungutan pada pelayanan pembuatan IMB sehingga sudah tidak ada lagi pendapatan dari Kecamatan Tambang Ulang.

6. Realisasi Belanja menurut jenis belanja

Realisasi Belanja menurut jenis belanja terdiri dari Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL).

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realis asi
a)	Gaji dan Tunjangan	1.598.026.526	1.099.948.417	68,83
b)	Tambahan Penghasilan ASN	1.358.378.268	1.070.297.547	78,79
	Total	2.956.404.794	2.170.245.964	73,41

Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2023 Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 2.170.245.964,- dari target anggaran sebesar Rp. 2.956.404.794,- (73,41%).

Realisasi Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja Barang/ Jasa	945.173.138,-	805.122.046,-	85,18
2	Belanja Modal	138.798.000,-	47.871.000,-	34,49
	Jumlah	1.083.971.138,-	852.993.046,-	78,69

Realisasi Belanja Langsung (BL) Tahun 2023 Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 852.993.046,- dari target anggaran sebesar Rp. 1.083.971.138,- (78,69%).

7. Realisasi Pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Realisasi Pembiayaan menurut jenis pembiayaan pada Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah tidak ada realisasi, karena tidak ada penganggaran untuk pembiayaan pada Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Perubahan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran Tahun 2023 terhadap Kegiatan dan Alokasi yang terkait dengan **Pengelolaan Pendapatan** pada Kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan adalah tidak ada. Demikian juga halnya Perubahan dalam rangka pencapaian target **Pengelolaan Pembiayaan** pada Kantor Kecamatan Tambang Ulang Provinsi Kalimantan Selatan adalah tidak ada. Pada Perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan **Pengelolaan Belanja** dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran adalah tidak ada perubahan anggaran.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan memuat:

- 1) Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja;

Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2023

No.	KINERJA		INDIKATOR KINERJA	TARGET
ESELON 3 (CAMAT)				
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat	1	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Umum yang ada di kecamatan	75%
ESELON 3 (SEKCAM)				
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan	1	Nilai SAKIP Kecamatan	76,35
	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	2	Persentase pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaianya yang tertib	100%
ESELON 4 (KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN)				
3	Menyusun dokumen perencanaan Kinerja dan	1	Jumlah Dokumen perencanaan Kinerja dan	8 Dokumen

	perencanaan Keuangan		perencanaan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.	
	Menyusun laporan Kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	2	Jumlah laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	3 Dokumen
ESELON 4 (KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)				
4	Memberikan pelayanan administrasi perkantoran	1	Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik	15 orang
	Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor	2	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	235 buah
	Memberikan Pelayanan administrasi Kepegawaian	3	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	15 Dokumen
	Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan diklat aparatur	4	Jumlah fasilitasi diklat dan sertifikat	-
ESELON 4 (KASI PEMERINTAHAN)				
5	Fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan BPD	1	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	9 Desa
	Fasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD	2	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD	9 Desa
	monitoring penyusunan laporan kependudukan	3	jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	9 Desa
	fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	4	jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	33 orang
ESELON 4 (KASI KEMASYARAKATAN)				

6	Memberikan Pembinaan Kepada kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan	1	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina dibidang sosial	8 Kelompok
	Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan	2	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP.	3 Kegiatan
	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di kecamatan	3	Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuan sosialnya	2028 orang
ESELON 4 (KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN)				
7	Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi.	1	jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	9 Kelompok
	Memberikan Pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat.	2	jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	9 Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3	jumlah desa yang mengelola keuangannya dengan baik	9 Desa
	Memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil	4	jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP	-
	Fasilitasi Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	5	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang	1 kali
ESELON 4 (KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN)				
8	Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	1	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitasi	9 Desa
	Membina kelompok	2	Jumlah kelompok masyarakat	9 desa

	masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban		di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	
	Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	3	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring	9 desa
	Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	4	Jumlah sosialisasi penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring	6 kali
ESELON 4 (KASI PELAYANAN)				
9	Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	1	Jumlah Pelayanan Masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP	10 Layanan
	Memfasilitasi penanganan aduan masyarakat	2	Jumlah aduan masyarakat yang difasilitasi	1 Aduan
	Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	3	Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	100 lembar

- 2) Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan pada setiap Urusan Pemerintahan/ Urusan Penunjang/ Urusan Pendukung Pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

Tabel Capaian Kinerja Keluaran Masing - Masing Kegiatan Sesuai Target Dalam Dokumen Anggaran Tahun 2023.

PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	% REALISASI
I. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.643.146.442	2.687.643.940	74
1.Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.704.700	3.644.800	98,4

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.804.700	2.764.400	98,6
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000	880.400	97,8
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.958.904.798	2.170.879.464	73,4
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.956.404.794	2.170.245.964	73,4
- Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	2.500.000	633.500	25,34
3.Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.938.496	249.425.468	87,2
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.081.227	61.071.834	68,6
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.011.626	6.384.000	91,04
- Penyediaan Bahan/Material	9.990.643	8.750.000	87,58
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.855.000	173.219.634	96,31
4.Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	6.985.151	34,92
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	6.985.151	34,92
5.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	287.448.448	173.944.720	60,51
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.899.768	51.791.980	31,40
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.548.680	122.152.740	99,67
6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.150.000	82.764.337	95
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.305.000	28.275.600	99,89
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan	54.945.000	51.560.037	93,83

perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.900.000	2.928.700	75,09
II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.000.000	5.670.000	94,5
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan	6.000.000	5.670.000	94,5
- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.000.000	5.670.000	94,5
III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	34.865.120	20.920.360	60
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.865.120	20.920.360	60
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.865.120	20.920.360	60
IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.327.900.314	1.028.209.710	77,43
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.327.900.314	1.028.209.710	77,43
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUDN RI Tahun 1945, pelestarian bhineka Tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan RI	99.990.483	93.520.000	93,5
- Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan Nasional.	1.165.934.831	885.710.070	75,96

- Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	61.975.000	48.979.640	79,03
V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.464.060	19.895.000	70
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.464.060	19.895.000	70
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.539.760	11.850.000	94,49
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.928.080	4.600.000	66,4
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.996.220	3.445.000	38,3
Jumlah	5.040.375.932	3.762.339.010	74,64

Pada Capaian Kinerja Keluaran dari masing – masing kegiatan pada setiap Urusan Pemerintahan/ Urusan Penunjang/ Urusan Pendukung Pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 3.762.339.010,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.040.375.932,- atau 74,64 %. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam hal pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

3) Analisa Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Dalam hal kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 sudah sesuai.

5.1.1. Tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Keg	Prog/	Targe	Realisas	Per masalah	Upaya Mengatasi Per masalah	Tinjut Rekomenda si DPRD
----	---------------------	---------------	-----------	------------	-------	-------	----------	-------------	-----------------------------	--------------------------

1	Unsur Kewilayahan	Kec Tambang Ulang		Prog penunjang urusan pemda kab/kota	1 tahun	74%	Tidak ada		
				Prog penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 tahun	94,5%	Tidak ada		
				Prog Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1 tahun	60%	Tidak ada		
				Prog penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1 tahun	77,43%	Tidak ada		
				Prog Pembinaan dan Pengawasan pemdesa	1 tahun	70%	Tidak ada		

5.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang Kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Adanya aturan pada pungutan IMB pada masyarakat di tiadakan, pungutan tersebut bisa dilaksanakan apabila pemda memiliki aturan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	SE.Mendagri No.973/1030/SJ No.SE - I/MK.07/2022 Menyebutkan Pemda memiliki kewenangan untuk tetap menerapkan pungutan yang mengacu pada Perda Retribusi IMB sepanjang tetap memberikan layanan PBG.	Sampai saat ini untuk pungutan IMB pada masyarakat ditiadakan.

5.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Memaksimalkan dan melakukan inovasi dalam meningkatkan	- Melakukan monitoring dan	Optimalisasi dan peningkatan sumber daya manusia masyarakat desa,

	masyarakat untuk pembangunan desa,	Evaluasi Desa - Mengadakan Sosialisasi, pelatihan dan menciptakan inovasi	diharapkan pembangunan di desa lebih cepat, tepat dan terarah
2.	Mengoptimalkan dalam upaya keterbukaan infomasi public dapat berupa inovasi dan imrpovisasi dalam penyampaian pelayanan masyarakat	Terwujudnya pelayanan publik kepada masyarakat dan keterbukaan informasi	Meningkatkan pelayan publik kepada masyarakat Tidak ada pungutan biaya akan pelayanan Terbuka dengan informasi yang dibutuhkan masyarakat
3.	Mengoptimalkan serapan program Hibah 1 (satu) miliar per kecamatan melalui peningkatan SDM dikecamatan selaku verifikator serta sosialisasi program hibah dan tata cara pertanggungjawabannya	Seleksi penerima hibah dengan proses verifikasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dengan beberapa indikator kesesuaian dalam peningkatan kemajuan masyarakat	Anggaran yang diterima diharapkan dapat menarik minat masyarakat dalam meningkatkan peran serta menuju pembangunan daerah

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan pada Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan pada Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima pemerintah tingkat atasnya pada Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah tidak ada.

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya pada Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah tidak ada.

4.2. Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah dibawahnya pada Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan adalah tidak ada hambatan/ permasalahan karena tidak ada tugas pembantuan di Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kantor Kecamatan Tambang Ulang dalam usaha mewujudkan pencapaian target tolak ukur kinerja maupun pencapaian target kinerja keuangan secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang dihadapi, hal ini dilihat dari uraian hasil capaian kinerja fisik semua program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tambang Ulang dapat terlaksana secara baik, namun dari sisi pencapaian target pendapatan masih belum mencapai target yang ditetapkan, Kecamatan Tambang Ulang dalam hal ini masih banyak yang perlu koreksi saran dan masukan .

Laporan Kinerja Pertanggung jawaban Pemerintah Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten tanah laut Tahun 2023 merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Kecamatan Tambang Ulang. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kecamatan Tambang Ulang melaksanakan 5 (lima) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan. Adapun alokasi dana yang diterima pada Tahun 2023 terdiri dari Belanja Daerah sebesar Rp. 5.040.375.932,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.762.339.010,- atau 74,64 %. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam hal pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 yang dikelola SKPD Kecamatan Tambang Ulang sebesar Rp 0,- yang berasal dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak tercapai karena adanya larangan pungutan kepada masyarakat. Bila dibandingkan dengan anggaran pendapatan asli daerah tahun 2022 yaitu sebesar Rp 0,- maka tidak ada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kantor Kecamatan Tambang Ulang.

Dari kondisi tersebut, adapun solusi yang diambil oleh Kecamatan Tambang Ulang antara lain :

1. Mengadakan sosialisasi lebih giat lagi untuk masalah izin pendirian IMB bagi masyarakat umum yang akan mendirikan bangunan.
2. Mengusulkan ke BKD untuk penambahan pegawai.
3. Menambah sarana dan prasarana penunjang kerja lainnya untuk kelancaran tugas kantor.

Demikian laporan LKPJ-LPPD Tahun 2023 Kecamatan Tambang Ulang ini disusun dan dibuat berdasarkan kondisi yang ada saat ini dan kami juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam partisipasinya sehingga tersusunnya laporan ini sesuai waktu yang ditentukan.

Akhirnya semoga LKPJ-LPPD Tahun 2023 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah Kabupaten Tanah Laut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2023**

KABUPATEN : TANAH LAUT
NAMA SKPD : KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG
URUSAN YANG DILAKUKAN: URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Dilisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN	
							(1)	(2)
1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional yang melekat di kementerian/LPND 1 yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat diaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% kegiatan	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak _____ program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak - 5 program ,9 Kegiatan, 22 sub kegiatan	74,64%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP Kasubbag Kepegawaian 2. SOP Kasubbag Perenc.Keu.	Ada 2 SOP /	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis	
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	- PERDA pelaksanaan sebanyak bn PERDA yang seharusnya, sebanyak ---	0 %	1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan.	
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang disi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 sebanyak 9	100 %	Jabatan yang harus ada,	

¹ Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	5	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----.	tidak ada	Mengacu terakhir/updated Tahun 2023.	kondisi SKPD
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio PNS Kabupaten	6	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 15 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6011 personil	0,25 %	Mengacu terakhir/updated Tahun 2023.	kondisi SKPD
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi persyaratan pelatihan kepemimpinan 8 org. Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	89 %	Mengacu terakhir/updated Tahun 2023.	kondisi terakhir/updated Tahun 2023.
	8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 9 org. Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %	Mengacu terakhir/updated Tahun 2023.	kondisi terakhir/updated Tahun 2023.
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada perencanaan SKPD berikut jumlahnya		Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2023, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capatan Kinerja	KETERANGAN
Sinkronisasi SKPD dengan Program RKP 10	Program RENJA		Jumlah Program RKP 10	Jumlah Program RKP 10 yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKP 10 yang TIDAK diakomodir dalam Renja SKPD, tidak ada	100%	Mengacu dokumen RKP 10 tahun 2023 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi SKPD dengan Program RKP 11	Program RKA		Jumlah Program RENJA RKP 11 yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKP 11 yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKP 11 yang TIDAK diakomodir dalam RKA SKPD, tdk ada	100%	Mengacu dokumen RENJA-SKPD tahun 2023 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	Pelaksanaan Program	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang TIDAK diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak - program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.	100%	Mengacu dokumen RENJA-SKPD tahun 2023 dan dokument DPA-SKPD ybs tahun 2023.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Program RENJA SKPD yang TIDAK diakomodir dalam DPA SKPD x 100%	74,64 %	Mengacu APBD tahun 2023 terakhir.
Besaran belanja modal	Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 5.040.375.932,-	2,75 %	Mengacu APBD tahun 2023 terakhir.
Besaran belanja pemeliharaan	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 87.150.000,-	9,2 %	Mengacu APBD tahun 2023 terakhir.
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 87.150.000,-	1,72 %	Mengacu APBD tahun 2023 terakhir.

ASPEK	FOKUS	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada (Neraca, Calk) Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ---- jenis, sbb: - Calk - Neraca - LRA (laporan realisasi) - LO - LE	Ada/ Ada sebanyak 5 jenis	Teliti apakah yang ada sudah lengkap (Calk,Neraca, LRA,LO,LE)
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumentnya. 1. KIB A 2. KIB B 3. KIB C 4. KIB D 5. KIB E 6. KIB F	Ada	
	Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikehualai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 120 asset.	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 1. Papan pengumuman 2. Kotak pengaduan 3. Papan data 4. Leaflet 5.	Sebutkan jenisnya Jumlah sebanyak 4 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Responsivitas partisipasi masyarakat	terhadap	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Pelayanan	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum Kecamatan

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERIA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2023

KABUPATEN : TANAH LAUT

DAFTAR PNS DAN PTT
KECAMATAN TAMBANG ULANG TAHUN 2023

NO	NAMA / NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	MUHAMMAD AMINULLAH,S.STP,M.AP NIP. 19870308 200602 1 002	L	Pembina (IV/a)	S2	Camat
2	AURANTI MURAYA.P,S.STP NIP. 19860502 200412 2 001	P	Penata TK. I (III/d)	S1	Sekcam
3	FITRIANI, S.Sos,M.AP NIP.19780925 199703 2 001	P	Pembina (IV/a)	S2	Kasubbag Perenc & keu
4	H. SYAMSURI, S.Pd NIP.19680319 198803 1 004	L	Penata TK. I (III/d)	S1	Kasi Pelayanan
5	TASDIK,S.Kep,Ns NIP.19720705 199303 1 008	L	Penata TK. I (III/d)	S1	Kasi PMD
6	KHALIKENN00R,S.Ag NIP. 19750301 200801 1 024	L	Penata TK. I (III/d)	S1	Kasi Trantib
7	RIA ANGGRAENY, SE NIP.19780616 200803 2 002	P	Penata TK. I (III/d)	S1	Kasi Kesmas
8	HAMDAH, S.Pd NIP. 19771029 201001 2 009	P	Penata TK. I (III/d)	S1	Kasubbag Umpeg
9	PUTRI NURLITA, S.STP NIP. 19950309 201708 2 001	P	Penata Muda TK. I (III/b)	S1	Kasi Tapem
10	YETTI YUNIATI NIP. 19730622 199403 2 003	P	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA	Bendahara Pengeluaran
11	RUSTAM EFENDI NIP. 19670903 200604 1 006	L	Penata Muda (III/a)	SMA	Pengadministrasi Umum (Umpeg)
12	ZAHRIANA, S.Kom NIP 19780422 201001 2 008	P	Pengatur Tk. I (II/d)	S1	Pranata Komputer
13	RATRI PURWONO NIP 19660515 200701 1 039	L	Pengatur Tk. I (II/d)	SMA	Pengadministrasi Umum (Seksi Tapem)
14	ENDANG SUNARDI NIP 19770814 200701 1 011	L	Pengatur Tk. I (II/d)	SMA	Pengadministrasi Umum (Seksi Pelayanan)
15	BAHRUDIN NIP 19700620 200701 1 030	L	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Paket B	Pengadministrasian Umum (Seksi Trantib)
16	HILALIYAH, SE NIP. -	P	-	S1 Ekonomi/UNISKA 2008	Tenaga Administrasi Pelayanan
17	MULIANA, SE NIP. -	P	-	S1 Akuntansi	Operator Kecamatan
18	M. SAIDI RAHMAN NIP. -	L	-	MTs/2005	Jaga Malam
19	MUHAMMAD HUSAINI NIP. -	L	-	Paket C/2009	Kebersihan Luar
20	SAIDI NIP. -	L	-	Paket A/2015	Kebersihan Dalam

**Tabel 1.1 PNS DAN PTT KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG TAHUN 2023
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	S 2	1	1	2
2	S 1	3	5	8
3	D III	0	0	0
4	SMA/Sederajat	3	1	4
5	SMP/Sederajat	1	0	1
6	SD/Sederajat	0	0	0
Jumlah		8	7	15

**Tabel 1.2 PNS KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG TAHUN 2023
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN**

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah	Keterangan
1	Pembina	IV/a	2	
2	Penata Tk. I	III/d	6	
3	Penata Muda Tk.I	III/b	2	
4	Penata Muda	III/a	1	
5	Pengatur Tk. I	II/d	3	
6	Pengatur	II/c	0	
7	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1	
Jumlah			15	

Tabel 1.8 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PADA KANTOR KECAMATAN TAMBANG
ULANG TAHUN 2023

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Filling Besi/Metal	1	1	0
2	Meja Komputer	1	1	0
3	Kursi Kerja	1	1	0
4	Kursi Putar	1	1	0
5	Kursi Kerja	1	1	0
6	Meja Kerja	1	1	0
7	Kipas Angin	1	1	0
8	P.C Unit/Komputer PC	1	1	0
9	Printer	1	1	0
10	Genset	1	0	1
11	P.C Unit/Komputer PC	1	1	0
12	Lemari Es	1	1	0
13	Mesin Tik Manual Standar (14-16)	1	1	0
14	Lemari Besi	2	2	0
15	Lemari Besi	1	1	0
16	Filling Besi/Metal	2	2	0
17	Filling Besi/Metal	1	1	0
18	Filling Besi/Metal	1	1	0
19	Brand Kas	1	1	0
20	Meja Kayu	1	1	0
21	Meja Kayu	1	0	1
22	Kursi Putar	1	0	1
23	Meja Komputer	1	1	0
24	Kursi Rapat	2	2	0
25	Kursi Lipat	2	2	0
26	Kursi Kerja	1	1	0
27	Kursi Kerja	1	1	0
28	Meja Kerja	4	4	0
29	Meja Kerja	1	1	0
30	P.C Unit/Komputer PC	1	1	0
31	Laptop	2	2	0
32	Laptop	1	1	0
33	Note Book	1	1	0
34	Printer	1	1	0
35	Printer	1	1	0
36	Printer	1	1	0
37	Proyektor + Attachment	1	1	0
38	Rak Besi	1	1	0
39	Laptop	1	1	0
40	Handspray	2	2	0
41	Baterai Laptop	1	1	0
42	Kipas Angin	1	0	1
43	Kipas Angin	2	0	2
44	Tangga	1	1	0
45	Camera + Attachment	1	1	0
46	Wireless Portable (Sound System)	1	1	0
47	Meja Kayu	2	0	2
48	Meja Kayu	1	0	1

49	Kursi Putar	1	1	0
50	Kursi Kerja	1	1	0
51	AC Split	1	1	0
52	Printer	1	1	0
53	Printer	1	1	0
54	Printer	1	1	0
55	Buffet Kayu	1	0	1
56	Meja Rapat	5	5	0
57	Kursi Rapat	28	28	0
58	Kursi Putar	1	1	0
59	Kursi Plastik	101	0	101
60	AC Split	1	1	0
61	Kipas Angin	1	1	0
62	Kipas Angin	2	2	0
63	Microphone/Wireless Mic	1	1	0
64	Loudspeaker	2	2	0
65	Loudspeaker	2	2	0
66	Mixer Amplifier	1	1	0
67	Audio Sound System	1	1	0
68	Stand Microphone	3	3	0
69	Lemari Arsip	1	1	0
70	Lemari Arsip Kaca	2	2	0
71	Meja Resepsonis	1	1	0
72	Mesin Pemotong Rumput	1	1	0
73	A.C Split (2 PK)	4	4	0
74	A.C Split (1/2 PK)	2	2	0
75	Microphone Tanpa Kabel	4	4	0
76	Mixer Soundsystem	1	1	0
77	Power Bel Soundsystem	1	1	0
78	Speaker	2	2	0
79	Laptop	1	1	0
80	Notebook/Laptop	1	1	0
81	PC	2	2	0
82	Hardisk Portable	1	1	0
83	Printer Portable	2	2	0

Tanganyika

Tanganyika

Tanganyika

